



PERJANJIAN KINERJA
DAN KOMITMEN PENGAWALAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil, serta pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional/daerah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Wibowo Aji
Jabatan : Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Muhammad Yusuf Ateh
Jabatan : Kepala BPKP

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dan berkomitmen melaksanakan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) serta Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) sesuai lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja dan APP tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pelaksanaan APP dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Muhammad Yusuf Ateh
NIP. 19640809 198503 1 001

Yogyakarta, 10 Desember 2021
Pihak Pertama,

Tri Wibowo Aji
NIP. 19741012 199502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

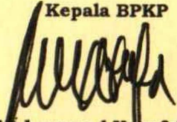
PERWAKILAN BPKP JAWA TENGAH

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Satuan	Jumlah
1		2	3	4
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	849,00
		2 Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	48.809,00
		3 Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	591.980,50
		4 Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	99.430,00
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	1 Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	7,00
		2 Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85,00
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	1 Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	0,00
		2 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	28,00
		3 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	8,00
		4 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	102,00
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	1 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100,00
		2 Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	80,00
		3 Jumlah Pemda menindak lanjuti Area Of Improvement dari hasil pengukuran EPK	Pemda	1,00
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	1 Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Prov	1,00
		2 Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/kota	23,00
		3 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Prov	1,00
		4 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/kota	29,00
		5 Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Prov	1,00
		6 Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/kota	10,34
		7 Persentase desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Persen	100,00
		8 Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	7,00
		9 Persentase Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Persen	70,00
		10 Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	400,00
		11 Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	BUMN	1,00
		12 Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	8,00

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Satuan	Jumlah
1		2	3	4
6	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	87,00
		2 Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	95,00
		3 Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	Persen	100,00
		4 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Nilai	80,00
		5 Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	83,00
		6 Persentase penyelesaian RTP (MR Unit kerja)	Persen	100,00
		7 Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)	Persen	65,00
		8 Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks Skala 100	80,00

Program	Anggaran
1 Pengawasan Pembangunan di Perwakilan	Rp 3.698.140.000,00
2 Pelaksanaan Dukungan Manajemen	Rp 45.459.543.000,00
	Rp 49.157.683.000,00

Yogyakarta, 10 Desember 2021

Kepala BPKP

 Muhammad Yusuf Ateh
 NIP. 19640809 198503 1 001

Plt. Kepala Perwakilan

 Tri Wibowo Aji
 NIP. 19741012 199502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN

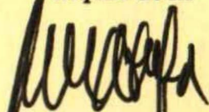
NO	KODE TOPIK	TOPIK PENGAWASAN	UNIT KERJA RENDAL	TARGET PELAPORAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	A.1.a.	Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional	204	-	√	-	-
2	A.1.b.	Peningkatan Sarana-Prasarana Pendidikan	204	-	-	√	-
3	A.1.c.	Bantuan Operasional Sekolah	204	√	-	-	-
4	A.1.d.	Program Indonesia Pintar (KIP dan KIP Kuliah)	204	-	√	-	-
5	A.1.e.	Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	204	-	√	-	-
6	A.2.a.	Penanganan Covid-19 (Vaksinasi)	203	√	√	√	√
7		Penanganan Covid-19 (Pembayaran Klaim Rumah Sakit)	203	√	√	√	√
8	A.2.b.	Stunting	204	-	-	√	-
9	A.2.d.	Reformasi Sistem Kesehatan (Kemandirian Industri Farmasi dan Almatkes)	201	-	-	-	√
10		Reformasi Sistem Kesehatan (Layanan Primer)	203	-	-	-	√
11		Reformasi Sistem Kesehatan (Layanan Rujukan)	203	-	-	-	√
12		Reformasi Sistem Kesehatan (Kualitas dan Redistribusi Tenaga Kesehatan)	203	-	-	-	√
13	A.3.a.	Peningkatan Tata Kelola Data Terpadu Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah (DTKS dan Basis Data Terkait Lainnya)	203	√	-	-	-
14	A.3.c.	Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja)	203	-	√	-	-
15	A.3.d.	Implementasi Bansos APBD	302	-	√	-	-
16	A.3.e.	Implementasi Bansos APBDesa	303	-	√	-	-
17	B.1.a.	Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun)	103	-	-	-	√
18	B.1.b.	Infrastruktur SPAM	103	-	-	-	√
19			405	-	-	-	√
20	B.1.c.	Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)	103	-	-	-	√
21	B.2.a.	Infrastruktur Jaringan Gas	102	-	-	√	-
22	B.2.b.	Infrastruktur Jaringan Irigasi	103	-	-	√	-
23	B.3.a.	Pembangunan Jalan	103	-	-	-	√
24	B.3.b.	Pembangunan Jembatan	103	-	-	-	√
25	B.3.c.	Infrastruktur Jalan Tol	103	-	-	-	√
26	B.3.d.	Pembangunan Jalur Kereta Api (termasuk kereta cepat Jkt - Bdg)	103	-	-	-	√
27	B.3.e.	Pembangunan Bandara	402	-	-	-	√
28	B.4.a.	Penyediaan BTS	204	-	-	√	-
29	B.4.b.	Penyediaan Akses dan Kapasitas Jaringan Internet	204	-	-	√	-
30	C.2.a.	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	301	√	-	-	-
31	C.2.b.	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	301	√	√	-	√
32	C.2.c.	Optimalisasi PAD	301	-	√	-	-
33	C.2.d.	Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah, melalui Ketepatan dan Efektivitas Penggunaan Dana Transfer (fokus pada sektor pendidikan dasar dan menengah)	302	-	-	√	-
34	C.2.f.	Pemanfaatan APBD untuk PC-PEN (termasuk TKDD)	302	√	√	√	√
35	C.3.a.	Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa (Perencanaan)	303	√	-	-	-
36		Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa (Akuntabilitas)	303	√	√	√	√
37	C.3.b.	Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa	303	√	-	-	-
38	C.4.a.	BUMN	401	-	-	√	-
39	D.1.a.	Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro	104	-	√	-	√
40	D.1.b.	Fasilitasi Kredit Pemerintah untuk UMKM (KUR dan Non KUR, baik reguler maupun tambahan)	403	-	√	-	√
41	D.3.b.	Kemudahan Perizinan (OSS)	302	√	-	-	-
42	D.4.b.	P3DN (fokus pada industri Kesehatan, Industri Energi, Industri Jasa Konstruksi dan 10 K/L dengan anggaran terbesar)	104	√	-	-	-

NO	KODE TOPIK	TOPIK PENGAWASAN	UNIT KERJA RENDAL	TARGET PELAPORAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
43	D.5.a.	Pengembangan DPSP	104	-	-	-	√
44	D.5.b.	Bantuan Stimulus kepada Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Masa Pandemi Covid-19	104	-	-	-	√
45	E.1.a.	Tata Kelola Subsidi Pupuk	403	-	-	√	-
46	E.1.b.	Tata Kelola Program Benih Unggul (Padi) (Dana Kementerian Pertanian)	102	-	-	√	-
47		Tata Kelola Program Benih Unggul (Padi) (Dana Kementerian Desa dan APBD)	302	-	-	√	-
48		Tata Kelola Program Benih Unggul (Padi) (Dana Kementerian Desa dan APBD)	303	-	-	√	-
49	E.1.c.	Tata Kelola Program Bibit Ternak	102	-	-	√	-
50		Tata Kelola Program Bibit Ternak (Dana Kemendes PDTT dan APBD)	302	-	-	√	-
51			303	-	-	√	-
52	E.2.a.	Dukungan Peralatan Produksi Pertanian	102	-	-	√	-
53		Dukungan Peralatan Produksi Pertanian (Dana Kemendes PDTT dan APBD)	302	-	-	√	-
54			303	-	-	√	-
55	E.2.b.	Dukungan Peralatan Produksi Perikanan	102	-	-	√	-
56	E.3.c.	Infrastruktur Pelabuhan Perikanan	102	-	-	√	-
57		Infrastruktur Pelabuhan Perikanan (Pemda)	302	-	-	√	-
58	E.5..a	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah	401	-	-	√	-
59	F.1.a.	Reformasi Birokrasi	205	-	-	√	-
60	F.1.b.	SPIP	304	-	-	-	√
61	F.1.c.	Kapabilitas APIP	304	-	-	-	√
62	F.2.a	Pencegahan Kecurangan	501	-	√	-	-
63	F.2.b	Deteksi Kecurangan	502	-	√	-	-
64	F.2.c	Respon Kecurangan	503	-	√	-	-
65	G.2.b.	Kartu Sembako	203	-	-	√	-
66	G.2.d.	Kartu Indonesia Pintar	302	-	-	√	-
67	G.3.c.	Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha	104	-	-	√	-
68	G.3.d.	Pengembangan Kewirausahaan, Kemitraan dan Keperantaraan	104	-	-	√	-
69	G.3.e.	Optimalisasi Program Padat Karya	102	-	-	√	-
70			103	-	-	√	-
71	G.3.f.	Pengembangan Potensi Desa	303	-	-	√	-

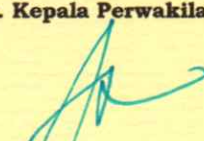
Yogyakarta, 10 Desember 2021

Plt. Kepala Perwakilan

Kepala BPKP



Muhammad Yusuf Ateh
NIP. 19640809 198503 1 001



Tri Wibowo Aji
NIP 19741012 199502 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN DAERAH**

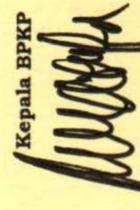
NO	NAMA CLUSTER	TEMA PENGAWASAN	INFORMASI YANG DIHARAPKAN	TARGET PELAPORAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	Pengawasan atas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	<p>1. Analisis desain/kebijakan atas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).</p> <p>2. Analisis tata kelola, identifikasi risiko, serta permasalahan strategis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).</p> <p>3. Analisis capaian kinerja, efektivitas, dan akuntabilitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).</p> <p>4. Analisis kinerja Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dihubungkan dengan dampak ke penurunan kawasan kumuluh, perbaikan kualitas hidup masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>5. Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</p>				✓
2	Pengembangan Kawasan dan Ekonomi Regional	Pengawasan atas Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB)	<p>1. Analisis desain/kebijakan atas Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).</p> <p>2. Analisis tata kelola, identifikasi risiko, serta permasalahan strategis Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).</p> <p>3. Analisis capaian kinerja, efektivitas, dan akuntabilitas Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).</p> <p>4. Analisis kinerja Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dihubungkan dengan dampak peningkatan/target investasi, penyerapan komoditas dan produk (bahan baku) lokal, penyerapan tenaga kerja lokal, serta peningkatan ekonomi regional (PDRB).</p> <p>5. Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</p>				✓

Yogyakarta, 10 Desember 2021
Plt. Kepala Perwakilan



Tri Wibowo Aji
NIP. 19741012 199502 1 001

Kepala BPKP



Muhammad Yusuf Atah
NIP. 19640809 198503 1 001